



REKONSTRUKSI PARIWISATA BALI PASCA PANDEMI COVID-19

A.A. Sagung Ayu Srikandi Putri¹, Ni Nyoman Sri Ratnawati², I.B.Gde Upadana³
Akademi Pariwisata Denpasar^{1, 2, 3}

Email: srikandi.putri1509@gmail.com¹; sriratnawati1703@gmail.com²;
bagusupadana@gmail.com³

Received: May 8th, 2023 | Accepted: October 16th, 2023 | Published: November 1st, 2023
Permalink/DOI: 10.53356/diparojs.v4i1.77

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berlaku sejak tanggal 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional. Pascapandemi Covid-19 yang telah meruntuhkan pondasi ekonomi Bali yaitu pariwisata, wacana migrasi ekonomi semakin menguat. Meski hal ini wacana lama, harus dipersiapkan dari sekarang yakni sumber daya manusia dan infrastruktur digital untuk menuju migrasi ekonomi. Saat inilah momen yang tepat bagi Bali untuk migrasi dari sektor pariwisata ke sektor lainnya. Dalam jangka pendek Bali harus dijadikan zona hijau untuk mengaktifkan kembali pariwisata serta perlunya insentif bagi pelaku usaha baik berupa restrukturisasi utang atau bantuan likuiditas agar pelaku usaha pariwisata dapat kembali *on*. Serta perlunya bantuan sosial untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Sementara dalam jangka panjang pariwisata yang tidak lagi menjadi penyangga ekonomi Bali, kedepan akan berkembang sektor pariwisata dalam arti luas dan industri pengolahan hasil pertanian. Migrasi ekonomi dengan peta jalan ekonomi kerthi sejalan dengan paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Peradaban modern dengan digitalisasi harus disikapi krama Bali dengan merubah *mindset* sehingga lahir portofolio penghasilan krama Bali dengan resiko yang relatif rendah. Dengan ketidakpastian Pariwisata yang begitu tinggi maka fokus ke pertanian dalam arti luas, perikanan dan digitalisasi UMKM merupakan sasaran strategis daya tahan ekonomi. Dengan *branding* yang dimiliki Bali maka krama Bali harus siap memasuki era new normal yang menjamin keamanan dan kenyamanan siapapun yang berbisnis di Bali. Dengan demikian Bali harus menjadi *centre of gravity* dalam bisnis digital, selain usaha tradisional yang sudah ada. Heritage budaya dan adopsi terhadap industri 4.0 harus menjadi prioritas dalam pengembangan kapasitas krama Bali. Semuanya untuk kesejahteraan krama Bali.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Pariwisata Bali.*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has been in stated since April 13th, 2020 based on Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters of Spreading Covid-19 as a National Disaster. After the Covid-19 pandemic which has undermined Bali's economic foundation, namely tourism, the discourse on economic migration is getting stronger. Although this is an old discourse, what must be prepared from now on is human resources and digital infrastructure to move towards economic migration. Today is the right moment for Bali to migrate from the tourism sector to other sectors. In the short term, Bali must be made as a green zone to reactivate tourism and the incentives for the entrepreneurs, either debt restructuring or liquidity assistance is needed, so that the tourism entrepreneurs can back to their productivity. And the need for social assistance to increase people's purchasing power. Meanwhile, in the long terms tourism is no longer a buffer for Bali's economy, in the future the tourism sector will develop in a broad sense and the agricultural product processing industry. Economic migration with the kerthi economic roadmap is in line with the paradigm of sustainable economic development that aims not only to meet the needs of the present but also of future generations. Modern civilization with digitalization must be addressed by the Balinese by changing the mindset so that it creates a portfolio of Balinese income with relatively low risk. Issued of the high uncertainty tourism makes the focus on agriculture in a broad sense, fisheries and the digitization of MSMEs are strategic targets for economic resilience. With the branding owned by Bali, the Balinese people must be ready to enter the new normal era that ensures the safety and comfort of anyone who does business in Bali. Thus, Bali must become the center of gravity in digital business, in addition to existing traditional businesses. Cultural heritage and the adoption of industry 4.0 must be a priority in developing the capacity of the Balinese people. Everything is for the welfare of the Balinese people.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Bali tourism

1. PENDAHULUAN

Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa Negara disamping sektor migas. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya. Serta memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki banyak daerah tujuan wisata, salah satunya adalah Bali.

Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang dilirik wisatawan sebagai tempat untuk berwisata. Bali terkenal akan keindahan alamnya, keunikan budaya dan

tradisi yang dimilikinya serta keramah-tamahan penduduknya. Hal inilah yang menjadi faktor utama berkembangnya Bali sebagai daerah tujuan wisata baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Pariwisata merupakan sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Namun, apa daya pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Meski berat dan penuh luka, tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan selain beradaptasi dengan menjalankan pola kehidupan baru. Selama hampir dua tahun masyarakat hidup dengan kenormalan baru. Semua sektor kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga Negara harus beradaptasi dengan

tatanan kehidupan baru demi menghadapi pandemi.

Proses perubahan yang dilakukan banyak mengadopsi teknologi. Teknologi menjadi jembatan dan solusi di tengah pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah.

Berkembangnya sektor pariwisata di Bali sejak era tahun 1980an berjalan demikian pesatnya menyebabkan sektor ini menjadi tumpuan dalam memajukan perekonomian di Bali. Dengan berbagai infrastruktur telah dibangun oleh para investor untuk kebutuhan para wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, menyebabkan pulau Bali sebagai destinasi wisata terkenal di mancanegara. Alam pulau Bali yang sangat eksotis dan akar budayanya yang sangat kuat, maka pengembangan pariwisata di Bali dibangun berlandaskan pariwisata budaya, yang mampu menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali mencapai 64 persen.

Akar budaya pariwisata di Bali didasari oleh budaya agraris masyarakat Bali yang diatur dalam sistem “*Subak*” memberikan nilai tersendiri dalam perkembangan pariwisata. Namun ironisnya semakin tahun sektor pertanian ini semakin terdegradasi dengan berbagai entitas yang diberikan di sektor ini khususnya minat generasi muda yang terjun di sektor pertanian karena dianggap kurang menjanjikan, dan beberapa permasalahan yang ada disektor pertanian. Ketika program revolusi hijau yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1970an untuk menggenjot produktivitas hasil pertanian, maka sektor pertanian menjadi titik berat pembangunan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu

berbagai infrastruktur dibangun baik *research and development* ataupun penyediaan tenaga penyuluh dan pendamping di setiap kecamatan dan desa dengan dibangunnya Balai Bali sebagai daerah destinasi pariwisata utama di Indonesia, lebih terfokus pada pengembangan sektor pariwisata dan ternyata mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Namun, sektor pertanian mampu sebagai penyangga perekonomian Bali pada dua kali krisis yang terjadi yaitu: (1) ketika terjadi kasus bom Bali tahun 2002 menyebabkan sektor pariwisata hancur, maka sektor pertanian mampu tetap menyangga perekonomian Bali; (2) sejak merebaknya kasus pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan hancurnya sektor pariwisata dan tertekan sampai minus 7, maka perekonomian Bali masih bisa tumbuh di sektor pertanian dan menyebabkan para tenaga kerja di sektor pariwisata kembali beralih di sektor pertanian.

Pandemi covid-19 telah menjadikan ekonomi Bali mengalami kehilangan potensi yang selama ini dimilikinya. Ekonomi Bali saat ini lunglai akibat ketidakhadiran para wisatawan yang selama ini telah menjadi potensi penggerak ekonomi Bali melalui industri pariwisata. Status pandemi *Covid-19* telah berlaku sejak tanggal 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Dengan status Pandemi tersebut menurut Keppres pemerintah melaksanakan kebijakan dibidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Pembatasan pergerakan masyarakat sebagai upaya memutus rantai penyebaran *Covid-19*

membawa akibat wisatawan terhambat untuk berkunjung ke Pulau Bali. Potensi ekonomi Bali selama ini memang bersandar pada sektor pariwisata. Sejak dihentikannya penerbangan dari berbagai negara serta dibatasinya penerbangan domestik otomatis kunjungan wisatawan ke Bali menjadi terhambat. Mata air ekonomi Bali bagai tersumbat dan tidak mengalirkan kesejahteraan ekonomi bagi *krama* (masyarakat) Bali. Wisatawan utamanya wisatawan mancanegara memang bisa dikatakan sebagai bahan bakar ekonomi Bali melalui industri pariwisata, yang pada gilirannya akan menghasilkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) bagi kabupaten/kota di Bali.

Sementara, tidak bisa dimungkiri juga bahwa PHR merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama bagi banyak kabupaten/kota di Bali. Gangguan atas fungsi ekonomi Bali ini telah berlangsung selama dua tahun terhitung sejak pandemi *Covid-19* merambah Indonesia pada Maret 2020. Sementara belum ada yang tahu kapan pandemi *Covid-19* akan mereda ataupun berakhir sama sekali. Gangguan ekonomi Bali tentu harus dapat segera dipulihkan tanpa menunggu redanya pandemi *Covid-19*, dengan meningkatkan potensi sumber daya yang kita miliki. Pemilik aset dan pekerja di bidang pariwisata kini sudah dalam kondisi kelimpungan untuk terus bertahan sambil menanti pulihnya sektor ini. Sudah tidak terhitung nilai kerugian yang dialami sejak dua tahun terakhir menghadapi ancaman pandemi *Covid-19* yang menjalar luas dan teramat ganas ke seantero dunia. Pariwisata bagaikan jantung ekonomi lokal yang mampu menghidupi penduduk pulau dewata se-hari-

hari. Perekonomian tumbuh dan berkembang pesat akibat dorongan kuat dari berbagai aktifitas yang berkaitan langsung dengan kepariwisataan.

Dampak signifikan juga dialami oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Bali dengan tumbuhnya investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun sejak hampir setengah abad terakhir ini. Pertumbuhan investasi tentu memberikan sumbangan pajak dan retribusi terhadap PAD serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran. Tidak berlebihan apabila Bali diberi predikat Daerah Tujuan Wisata (DTW) peringkat utama yang potensi daya tariknya setara dibandingkan daerah tujuan wisata papan atas didunia. Tetapi apa daya, predikat membanggakan itu telah dikoyak oleh ganasnya pandemi Covid-19 dan hingga kini upaya penanggulangannya tidak kunjung tuntas. Upaya pemerintah secara maksimal sejak dua tahun terakhir tidak pernah terhenti dan masyarakat secara sadar telah mematuhi anjuran apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi faktanya angka korban akibat keganasan pandemi ini seperti tidak mengenal batas usia, ruang dan waktu. Ketaatan terhadap berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam upaya mengendalikan meluasnya pandemi selama ini memang sangat diperlukan. Bagaikan berperang melawan musuh yang tidak tampak wujud phisiknya. Menjelang dua tahun pandemi Covid-19 melanda dunia belum ada suatu tanda bahwa wabah tersebut akan berakhir. Sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 penyakit itu telah menimbulkan dampak signifikan bagi

kehidupan manusia. Permasalahan dan tantangan dalam masa pandemi covid-19 merupakan ujian berat yang memerlukan keteguhan hati dan kesabaran revolusioner.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengertian Covid-19

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 yang merupakan Global Pandemi sesuai pernyataan *World Health Organization* (WHO). Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2019* atau disebut juga dengan Covid-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. *World Health Organization* (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi Covid-19 sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Istilah pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Sehingga WHO mendefinisikan pengertian Pandemi Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2. Sebagian besar orang yang tertular covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit

parah dan memerlukan bantuan medis. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap covid-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum adalah, demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum adalah, sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarkan virus SARS-Cov-2 diduga menyebar diantara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*). Menurut Situs Itjen Kemdikbud (2022), pengertian pandemi Covid-19 adalah wabah yang terjadi secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan penyakit menular (epidemi) yang menyebar hampir diseluruh negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi juga berdampak pada berbagai aspek termasuk kesehatan, ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tetapi virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus Covid-19 di Indonesia adalah 1) Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 2) Jemaah Indonesia batal berangkat umroh. 3) Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 4) Merusak tatanan

ekonomi di Indonesia. 5) Impor barang menjadi terhambat. Demi mencegah penyebaran virus Covid-19 ini sebaiknya selalu menjaga kebersihan, kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan.

2.2 Pengertian Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah “Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. Pariwisata juga dikatakan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk sementara waktu dengan maksud atau tujuan tidak untuk berusaha atau mencari nafkah ataupun menetap di tempat yang dikunjungi, akan tetapi untuk menikmati perjalanan tersebut sebagai rekreasi atau untuk memenuhi kegiatan yang beragam tanpa adanya suatu paksaan dan dilakukan perorangan maupun kelompok. Sedangkan menurut (Yoeti, 2005) kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar (tour) sedangkan wisata berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel. Atas dasar itu, maka kata pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat lain. Sedangkan menurut Marpaung (2002:25) menyatakan bahwa pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin,

keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal ditempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Mariotti (dalam (Yoeti, 1996) menyatakan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Sedangkan pengertian potensi wisata menurut sukardi (1998:67) potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Sementara itu menurut Sujali (dalam Amdani, 2008:67) menyebutkan bahwa potensi wisata sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, seperti alam, manusia serta hasil karya manusia itu sendiri.

Smith & Kelly (2006:98) memberi gambaran bahwa yang dimaksud wisata spiritual adalah segala jenis aktifitas dan atau perlakuan berwisata yang bertujuan untuk mengembangkan, merawat meningkatkan badan, pikiran dan jiwa. Sedangkan menurut Prayoga (1976) pariwisata sebagai industri mempunyai beberapa sifat khusus yang membedakan dengan industri lain. Sifat khusus tersebut adalah a) produk wisata mempunyai ciri bahwa ia tidak dapat dipindahkan. Orang tidak dapat membawa produk wisata pada langganan, tetapi langganan itu sendiri harus mengunjunginya, mengalami dan datang untuk menikmati produk wisata itu. b) dalam pariwisata produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang sama. Tanpa langganan yang sedang mempergunakan jasa-jasa itu tidak akan

terjadi produksi. c) sebagai suatu jasa, maka pariwisata memiliki berbagai ragam bentuk, oleh karena itu dalam pariwisata tidak ada standard ukuran yang obyektif sebagaimana produk lain yang nyata. d) langganan tidak dapat mencicipi, mengetahui atau menguji produk itu sebelumnya yang dapat dilihat isi, kapasitas dan bentuknya. e) dari segi usaha, produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar, industri pariwisata memerlukan modal besar, sedangkan permintaan sangat peka terhadap perubahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat, kesenangan wisatawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan industri yang memiliki banyak bentuk serta tidak dapat dipindahkan dan sebaiknya mempunyai langganan. Adapun batasan batasan tentang industri pariwisata menurut Yoeti (1999:9) adalah kumpulan dari bermacam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*good and services*) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveller pada umumnya, selama dalam perjalanannya.

2.3 Pengertian Rekonstruksi Pariwisata Bali

Pengertian rekonstruksi menurut Website Brainly.co.id adalah pengembalian sesuatu ketempatnya semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali menjadi kejadian semula (<https://brainly.co.id/tugas/948218>). Dengan demikian, yang dimaksud dengan rekonstruksi pariwisata Bali adalah karena Bali sebagai barometer Indonesia yang sebelumnya sempat menargetkan kunjungan wisatawan mencapai hingga 7 juta pada tahun

2020, akibat pandemi mengalami kerugian mencapai hingga 9,7 trilyun akibat dampak penutupan pariwisata, tetap melakukan promosi melalui digitalisasi. Hal ini dilakukan sebagai kesiapan untuk pariwisata ke depan. Pandemi Covid-19 ini mengajarkan agar semua pihak khususnya pelaku wisata mulai melakukan pembenahan terutama dalam menjaring klaster wisatawan yang bertujuan mendapatkan atau meningkatkan kualitas pariwisata, dimana pariwisata kedepan tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi spesifik terhadap para pelaku dan pengusaha saja, melainkan pariwisata yang berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat Bali secara menyeluruh. Bali yang memiliki sekitar 354 destinasi terus mencoba melakukan pembenahan termasuk wajib menyiapkan sarana protokol kesehatan bagi pemilik usaha. Pandemi Covid-19 meluluhlantakan perekonomian Bali selama hampir dua tahun belakangan, sehingga pertumbuhan ekonomi Bali berada paling bawah di Indonesia mencapai 10,98 minus kontraksi terdalam di Indonesia pada triwulan pertama adalah 1,14 persen. Dalam penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah secara serius melakukan sejumlah upaya untuk kembali dapat memulihkan perekonomian Bali, segala sesuatu diharapkan dapat dibantu dan didukung oleh masyarakat luas. Karena membina akomodasi disaat pandemi padat karya dan padat modal itu sangat dibutuhkan, sehingga persoalan yang dihadapi adalah tentang sumber daya manusia (SDM) dan modal yang tertanam. Untuk menggerakkan dunia pariwisata ditengah krisis akibat pandemi

Covid-19 terdapat tiga (3) hal yang mutlak dimiliki yakni ; a). Modal (modal sendiri atau modal yang bersumber dari pinjaman) yang digunakan sebagai obyek untuk memutar roda penjualan dan perekonomian. b). Bisnis plan (mimpi atau harapan) dalam membangun relasi sehingga dapat bertahan di masa pandemi. c). Cash flow adalah ketersediaan tetesan keuntungan dari modal dan usaha yang sedang dijalani. Berkaitan dengan banyaknya sumber daya manusia khususnya pelaku dan pekerja pariwisata yang dirumahkan, ke depannya perlu dibuatkan kebijakan lebih lanjut agar usaha ini tatkala dibuka kembali, dapat kembali diputar dan bergerak kembali. Sebaiknya semua pihak baik pemerintah dan pelaku usaha mulai mempertimbangkan cara kedepan agar tidak hanya bertumpu pada satu bidang, yakni pariwisata saja.

2.4 Sad kerthi dalam Bali Era Baru

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Propinsi Bali menerbitkan surat edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tatanan/Tata Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru. Tata titi kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara alam Bali, manusia/krama Bali, dan kebudayaan Bali yang meliputi adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala dan sekala* ini merupakan tata titi kehidupan masyarakat Bali yang *orisinil, genuine* Bali. Tata titi kehidupan yang menyatu dengan alam secara *niskala dan sekala* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan

kehidupan, terdiri atas : 1) *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa).2) *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut).3) *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air).4) *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan).5) *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia).6) *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta). Nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang sejatinya telah menjadi tata titi kehidupan masyarakat Bali secara turun temurun dalam memelihara/menjaga alam Bali. Nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang adi luhung ini, harus dilestarikan kepada generasi penerus, serta dijadikan dasar dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali secara permanen, sepanjang zaman. Menjadikan masyarakat Bali memiliki laku kehidupan se hari-hari yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap alam, untuk mewujudkan Bali tentram kerta raharja, yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan, serta tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional dan global.

3. METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiono, 2004:13). Menurut (Arikunto, 2006:11) Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang bersifat menggambarkan, memaparkan dan menguraikan obyek yang diteliti yaitu mengenai sejarah berkembangnya sektor kepariwisata Bali sampai terjadi Pandemi covid-19 yang meluluh lantakkan pariwisata Bali.

4. PEMBAHASAN

4.1 Gali Potensi Bali

Ekonomi Bali pada hakekatnya adalah ekonomi yang berbasis pada kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa, dengan berlandaskan pada kehidupan keseharian *krama* Bali. Sementara pariwisata Bali hanyalah produk akhir sebagai resultan dari serangkaian kehidupan kebudayaan *krama* Bali. Gangguan atas potensi Bali harus kita hilangkan. Ekonomi Bali pada dasarnya disangga potensi dari sektor budaya pertanian, budaya tradisi *krama* Bali, dan pariwisata itu sendiri. Keterpaduan tiga sektor utama ekonomi Bali ini merupakan potensi ekonomi yang sudah menjadi *social capital* (modal sosial) bagi *krama* Bali. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar potensi ekonomi Bali dapat kembali berdaya. 1) perlu merumuskan kembali modal kekuatan (*strengths*) ekonomi Bali. Kekuatan ekonomi Bali jelas berada pada sektor tersebut diatas. Potensi ekonomi sektor pertanian, tradisi, dan pariwisata harus berjalan seiring tanpa ada yang terlalu dominan. Sehingga jika terjadi gangguan potensi pada salah satu sektor, maka dua sektor lainnya akan menjadi penopang ekonomi Bali. 2) *krama* Bali perlu memahami kelemahan (*weaknesses*) atas potensi ekonomi yang dimiliki Bali, Seperti halnya pariwisata adalah sektor ekonomi tersier yang sangat rentan oleh gangguan pada faktor *security* dan *safety*. Sedangkan pertanian sebagai sektor ekonomi primer adalah budaya keseharian *krama* Bali yang belum berpola *industrial farming* dengan sentuhan *Hi-Tech* maupun *Hi-Touch*. 3) menelusuri peluang (*opportunities*) yang dimiliki dalam setiap potensi ekonomi Bali.

Pemahaman atas peluang ekonomi yang ada, akan membawa potensi ekonomi Bali menjadi tegak tegar lagi dalam mengoptimalkan peluang yang ada menjadi mesin ekonomi Bali yang tangguh menghadapi tantangan ekonomi global. 4) mengerti tentang ancaman (*threats*) yang menghadang eksistensi potensi ekonomi Bali menjadi kata kunci terakhir dalam upaya mengembalikan fungsi ekonomi Bali agar dapat memberikan kesejahteraan bagi *krama* Bali. Pemahaman atas keberadaan ancaman ekonomi ini akan memandu langkah-langkah upaya peningkatan kesejahteraan *krama* Bali. Pandemi Covid-19 telah mengubah peta situasi atas empat hal tersebut. Bali tidak bisa lagi berpegang pada strategi perencanaan yang selama ini telah dan sedang dilaksanakan. Perlu disusun peta jalan (*road map*) baru untuk menegakkan kembali ekonomi Bali. Dibutuhkan desain baru atas potensi ekonomi Bali pascapandemi Covid-19, dengan *mindset* mengembalikan kehidupan keseharian masyarakat kedalam anatomi yang sehat, sesuai sendi sosial budaya *krama* Bali. Perang menghadapi Covid-19 ini harus dihadapi dengan strategi yang matang.

4.2 Restorasi Pembangunan Sektor Pertanian Bali

Restorasi dapat didefinisikan sebagai upaya pengembalian atau pemulihan sesuatu dalam bentuk dan kondisi semula. Pengembalian atau pemulihan yang dimaksudkan disini yaitu penguatan dan pemberdayaan fungsi dan peranan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang tersebar di semua kecamatan di Bali. Namun ditemukan beberapa masalah yang cukup memprihatinkan yaitu 1) kondisi

bangunan dan ruang kantor serta lingkungan yang tidak terawat. 2) suasana dalam kantor yang terkesan sepi. 3) jumlah tenaga penyuluh pertanian sangat terbatas karena beberapa sudah memasuki masa pensiun, disatu sisi tidak ada penambahan tenaga penyuluh baru. 4) beberapa tenaga BPP yang sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun masih berstatus honorer. Oleh karena itu untuk mensukseskan program Gubernur Bali sebagai prioritas utama pembangunan Bali di sektor pertanian, maka restorasi yang harus dilakukan adalah menguatkan kembali peran BPP sebagai ujung tombak dalam menggerakkan sektor pertanian dengan memperbaiki beberapa permasalahan tersebut diatas. Apabila kondisi ini bisa direstorasi kembali maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya petani dan meningkatkan produktivitas, akan tetapi harus dibarengi perbaikan dalam permasalahan lainnya. Beberapa permasalahan klasik yang dihadapi oleh para petani adalah pemasaran dan stabilitas harga produk pertanian, yang salah satu faktor penyebab minat generasi muda untuk menggeluti sektor pertanian semakin menurun. Menciptakan keamanan dan kenyamanan para petani dalam menjalankan usaha taninya terutama dipasca panen dan pemasaran sangatlah penting. Oleh karena itu perlu adanya penguatan dan koordinasi yang kuat antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pihak Perbankan untuk menciptakan beberapa inovasi untuk melindungi para petani. Ditengah pandemi saat banyak orang di PHK dan ekonomi Bali terpuruk, pertanian

memberi optimisme baru bagi ekonomi Bali. Sebenarnya pandemi menjadi momen baik untuk kembali ke sektor pertanian yang menjadi budaya dan adat . Oleh sebab itu pandemi ini menjadi momentum baik untuk kembali ke pertanian.

4.3 Menjaga Warisan Ekonomi Kebudayaan Bali

Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan. Bahkan tumbuh positif dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Detail seperti ini semua harus tahu dan apa yang harus dilakukan. Hakekat ekonomi Bali pada dasarnya memang pertanian. Berawal dari budaya bertani, nenek moyang krama Bali melahirkan tatanan sawah berundak nan eksotis dengan tata air subak yang telah diakui dunia. Berlanjut dengan kegiatan seni-budaya dan *craftsmanship* di sela bertani, hingga akhirnya dikunjungi wisatawan yang terpesona oleh alam dan budaya Bali. Denyut kehidupan keseharian krama Bali memang seirama dengan detak kehidupan pertanian yang mengikuti kalender siklus musim alam. Berbagai upacara sesuai religiusitas Hinduisme krama Bali tetap berlangsung sesuai kalender triwara, pancawara, saptawara, sasih, hingga wuku, meski aktivitas kesehariannya dalam pusran industri pariwisata. Harus diakui, maraknya industri pariwisata Bali sedikit banyak telah memberi dampak negatif terhadap alam dan budaya Bali yang tidak kita inginkan. Eksplorasi yang berlebihan atas budaya dan alam Bali demi memenuhi tuntutan wisatawan, telah berubah menjadi eksploitasi atas budaya dan alam sehingga berakibat gangguan keseimbangan alam dan

kehidupan. Filosofi hidup krama Bali Tri Hita Karana sebenarnya telah mengajarkan betapa pentingnya nilai keseimbangan dalam keseharian kehidupan krama Bali. Keseimbangan dalam artian keharmonisan, menjadi kata kunci dalam filosofi ini agar tercapai kebahagiaan/kesejahteraan. Keharmonisan kehidupan dalam tataran Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Selama ini upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi krama Bali secara tidak sadar telah memberi dampak negatif terhadap alam dan gumi Bali. Belum lagi ditimpali dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian Bali terpuruk di titik terendah, utamanya akibat pembatasan mobilitas manusia guna memutus rantai penularan Covid-19. Ekonomi Bali harus dijalankan dengan tanpa merusak alam dan budaya Bali. Filosofi hidup krama Bali melalui sikap komunal penuh kemitraan yang telah menjadi lokal wisdom warisan tradisi ekonomi kebudayaan nenek moyang krama Bali, harus kembali dibangkitkan. Beberapa tindakan menjaga warisan ekonomi kebudayaan Bali dapat disiapkan yaitu : 1) harus ada paradigma baru atas industri pariwisata Bali. Selama ini atas nama pariwisata secara tidak sadar kita telah melakukan kegiatan yang membuat terjadinya degradasi alam, moral, dan budaya gaya hedonism melalui infiltrasi budaya asing. Pariwisata harus dikembalikan kepada marwah peradaban pertanian dan budaya Bali. 2) sendi sosial budaya krama Bali sebagai sosial kapital harus kembali menjadi panduan dan benang merah pada setiap tindakan para stakeholder dalam menyikapi situasi ekonomi dilematis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Demi selalu menjaga keseimbangan antara

materialisme dan spiritualisme. 3) lokomotif perekonomian Bali harus dikembalikan pada budaya pertanian dan berkesenian lewat industri kreatif, yang telah menjadi jati diri kehidupan keseharian dalam tradisi nenek moyang krama Bali. Sementara pariwisata hanyalah produk akhir akibat resultante kegiatan pertanian dan kesenian/kebudayaan/industri kreatif krama Bali.

4.4 Memuliakan Peradaban Bali

Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Propinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tatanan/Tata Titi kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara alam Bali, manusia/krama Bali dan kebudayaan Bali yang meliputi adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara niskala dan sekala yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal sad kerthi yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan yaitu antara lain, atma kerthi, segara kerthi, danu kerthi, wana kerthi, jana kerthi dan jagat kerthi. Nilai-nilai kearifan lokal sad kerthi yang sejatinya telah menjadikan tata titi kehidupan masyarakat Bali secara turun temurun dalam memelihara/menjaga alam Bali. Budaya adalah hulu perekonomian Bali, budaya, adat, dan tradisi adalah modal utama Bali. Bali tidak memiliki sumber daya alam tambang atau gas, hanya memiliki adat budaya yang adiluhung sebagai *social-economic capital*. Agar nilai-nilai luhur budaya Bali dapat diwariskan secara berkelanjutan, kemudian menjadi konsep pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan

Bali (PKB) di Klungkung. PKB merupakan wujud inventarisasi warisan kebudayaan Bali masa lalu yang diintegrasikan dengan kebutuhan pengetahuan dan teknologi masa kini dan masa yang akan datang. Kawasan PKB seluas 300 hektare tersebut berada dalam bentang nyegara gunung. Sejarah peradaban Bali sendiri memang terpusat di Klungkung pada masa keemasan Raja Gelgel Waturenggong. Sehingga bukan kebetulan jika PKB dibangun di wilayah Klungkung. PKB sepenuhnya juga merupakan karya krama Bali. Sebagai sebuah entitas kehidupan yang penuh aura budaya tradisi, saat ini Bali sedang dilanda arus budaya global yang serba berubah dengan cepat. Bali sebenarnya memiliki kekayaan *cultural heritage* yang bersifat *tangible* maupun *intangible*. Sayangnya warisan budaya tersebut belum dilirik sebagai suatu potensi ekonomi yang luar biasa. Pusat Kebudayaan Bali juga diharapkan ikut menjadi sarana dalam mewariskan nilai-nilai luhur peradaban Bali secara berkelanjutan. Pengenalan sejarah sosial budaya Bali dalam kawasan Pusat Kebudayaan Bali akan menjadi cermin segenap pengunjung-utamanya krama Bali dalam memahami peradaban budaya Bali. Tata ruang Pusat Kebudayaan Bali disusun dalam kerangka dasar Sat Kerthi Loka Bali. Kawasan PKB akan terdiri dari beberapa kawasan. Kawasan Wana Kerthi akan berisi hutan dan taman rekreasi. Dalam kawasan Danu Kerthi akan dibangun danau dan estuary dam. Sementara kehadiran Catus Pata akan dibangun dalam kawasan Atma Kerthi. Sedangkan kawasan Jagat Kerthi akan berisi panggung pertunjukan dan area pertunjukan lainnya. Kawasan Jana Kerthi menjadi kawasan pusat

kebudayaan Bali serta area pendukung seperti hotel dan apartemen. Marina dan fasilitas laut lainnya akan dibangun dalam kawasan Segara Kerthi. Pemuliaan dan pewarisan nilai luhur peradaban Bali memang menjadi kunci dalam meneguhkan kembali kebudayaan Bali, nantinya diharapkan dapat memahami keteguhan para leluhur mereka dalam membangun peradaban Bali. Pemahaman ini salah satunya adalah melalui kehadiran Pusat Kebudayaan Bali.

4.5 Bali Punya Modal Berdikari

Bali mandiri dan berdikari bukanlah hal yang mustahil. Bali punya modal untuk bangkit dan Bali memerlukan kesadaran untuk solid bergerak mengelola potensi yang ada. Peta jalan ekonomi kerthi Bali merupakan bentuk kesadaran kita atas potensi Bali yang bisa menjadi kekuatan Bali untuk bangkit dan mandiri. Salah satu Tri Sakti Bung Karno adalah berdikari secara ekonomi. Hal ini menjadi landasan dalam pembangunan Bali termasuk ekonomi Bali. Namun, dalam mewujudkan hal ini perlu upaya-upaya kongkret yang harus dilakukan bersama atas kesadaran bersama. Perlahan-lahan Bali diyakini mampu mewujudkan kemandirian ekonomi karena sejumlah amunisia telah dimiliki Bali diantaranya, lembaga keuangan milik *krama desa adat* yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Bahkan kesadaran akan kemandirian dibidang keuangan telah terbentuk sejak tahun 1984. Tidak hanya kemandirian di bidang keuangan, Bali juga telah mampu secara mandiri memproduksi pangan sendiri bahkan kesadaran memproduksi pangan sehat sudah mulai bergema di seluruh Bali. Jika hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali yang

berjumlah 4,3 juta, tanah Bali mampu memenuhinya. Begitu juga sumber daya masyarakat (SDM) Bali tidak kurang apapun dalam memenuhi segala kebutuhannya baik tuntutan kebutuhan primer maupun kebutuhan modernitas. Hanya saja Bali masih tertatih-tatih dalam memenuhi kebutuhan energi karena seperti diketahui Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang, hanya alam yang indah dan tanah yang subur. Maka dari itu pasokan energi baik listrik maupun BBM masih dipasok dari luar Bali. Meski demikian gerakan-gerakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seperti sumber daya matahari, sumber daya arus laut, dan sumber daya yang lain telah mulai dilakukan. Memang membutuhkan proses yang panjang namun kesadaran telah muncul. Kesadaran akan potensi Bali untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Bali telah dituangkan dalam peta jalan ekonomi Bali yaitu Ekonomi Kerthi. Gubernur Bali telah membuat jalan bagi Bali menuju berdikari secara ekonomi. Yang perlu dilakukan saat ini adalah pengawasan atau monitoring peta jalannya tersebut agar sesuai arah. Misalnya secara regulasi telah ditetapkan pemberdayaan produk lokal, kalau tidak disertai dengan pengawasan, seperti produk untuk menunjang aktivitas pariwisata, kalau tidak dipantau apakah pelaku pariwisata sudah atau belum menggunakan produk lokal. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mensukseskan peta jalan ini. Maka dari itu masyarakat juga harus ambil andil dalam menjalankan roda ekonomi Bali yang telah digariskan Gubernur Bali, diantaranya pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, sektor Industri Kecil

Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital dan sektor pariwisata. Peta ekonomi Bali ini harus kita maknai sebagai upaya untuk menjaga kemandirian secara ekonomi yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi yang dikenal *growth with equity*, dan saat ini Ekonomi kerthi Bali sebagai *roadmap* pembangunan perekonomian yang sudah dibuat Gubernur, dalam rangka mengimplementasi kemandirian ekonomi bisa terwujud baik jangka panjang dan menengah. *Roadmap* ini bisa terwujud dengan catatan ada perjuangan yang dilakukan secara keras. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahkan peta jalan ekonomi ini harus digugah bahwa hal tersebut penting untuk keberlanjutan dan ketahanan ekonomi Bali ke depannya. Dalam melewati peta jalan tersebut, pengetahuan atau *Knowledge* masyarakat sangat penting. Selain itu agar bisa berjalan sesuai peta, maka perlu di *organizing* dengan baik, siapa yang melakukan, siapa yang mengawasi, siapa yang memantau, siapa yang meneruskan di tingkat kabupaten/kota. Peta jalan tersebut harus dilakukan dengan kerja keras, *Strong*. Kita semua juga harus percaya, *Trust*, bahwa peta jalan ini terbaik untuk kepentingan kita semua, dengan demikian akan tercipta *Equilibrium*, seimbang diseluruh Bali antarsektor, tidak hanya dominan di pariwisata. Semua yang dilakukan harus berasaskan tanggung jawab atau *Responsibility*.

4.6 Pembinaan yang Harus Dilakukan

Sudah saatnya bagi pemerintah Daerah Bali untuk membangun masterplan yang

komprehensif, artinya yaitu membangun berbagai bisnis daerah yang inovatif untuk dapat memaksimalkan pendapatan ekonomi daerah yang inovatif, membuka lapangan kerja yang lebih luas, stabil dan mandiri. Salah satu yang bisa dikembangkan Bali dalam masterplannya adalah mengembangkan industri kreatif secara inovatif. Beberapa bentuk yang cukup berpotensi untuk Bali dan banyak daerah di Indonesia adalah *education tourism* atau wisata pendidikan. Pengembangan industri *tourisme pendidikan* ini bisa dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga terkait. Lalu ada *retriati & wellness tourism* atau pariwisata kesehatan yang sangat berpotensi menarik orang asing untuk tinggal lama dan melakukan pengeluaran secara konsisten untuk suatu daerah. Namun sejalan dengan gagasan sebelumnya bahwa kolaborasi bersama antara lembaga sangat perlu dilakukan baik dalam tatanan kebijakan, administrasi dan penguatan kualitas sektoral. Hal yang sama bisa dilakukan untuk pasar domestik. Kompleksitas sosial budaya masyarakat Bali yang modern namun juga masih erat dengan tradisi dan budaya seharusnya dapat secara maksimal menjadi industri baru yang bernilai ekonomi, sehingga Bali tidak perlu terlalu bergantung pada industri hotel atau jasa wisata sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi daerah.

5. SIMPULAN

Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata, namun pengembangan pariwisata Bali saat ini masih kurang terencana. Hal ini terjadi karena tidak ada masterplan atau rencana

induk yang komprehensif. Masterplan yang ada saat ini diluncurkan pada tahun 1969 dan sudah usang karena tidak mengikuti dinamika dan perubahan zaman yang mengakibatkan sektor pariwisata rentan. Kerentanan ini terlihat ketika pandemi covid-19 menghantam dan menghentikan kegiatan pariwisata di Bali. Hantaman pandemi covid-19 saat ini di pulau dewata lebih keras dibandingkan bom Bali dan meletusnya Gunung Agung. Ketika erupsi Gunung Agung, tingkat hunian hotel di Bali selatan. Seperti Badung, Denpasar dan Gianyar masih mencapai 60 persen, sebab radius berbahaya hanya pada jarak 12 km. Sejak bulan april 2020 hampir 96 persen hotel di Bali kosong karena tidak ada kunjungan wisatawan. Selama ini penyusunan masterplan pariwisata Bali masih reaktif dan parsial. Saat ini pengembangan pariwisata bisa dikatakan masih terkotak-kotak. Sebagai contoh jika sebuah desa mengembangkan objek wisata sendiri namun tidak ditunjang dengan aksesibilitas yang mendukung. Areal persawahan yang merupakan asset besar daerah dalam konteks sosio-kultural masyarakat Bali juga secara mudah teralih fungsikan menjadi areal perumahan yang sangat masif. Belum lagi areal perkotaan yang tidak bersahabat yang hanya menjadi jalur lalu lalang kendaraan tanpa memikirkan estetika, keindahan, keunikan arsitektur kotanya dan semakin jauh dari basis pariwisata budaya. Sudah saatnya bagi pemerintah daerah Bali untuk membangun masterplan yang komprehensif artinya membangun berbagai bisnis daerah yang inovatif untuk dapat memaksimalkan ekonomi daerah dan membuka lapangan

kerja yang lebih luas, stabil dan mandiri untuk kesejahteraan krama Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Brainly.co.id. Pengertian Rekonstruksi di <https://brainly.co.id/tugas/948218?utm-source=android&utm-medium=share&utm-campaign=question> (diakses 30 April 2023)

Keppres No.11 Tahun 2020. Tentang Penetapan Pandemi Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Keppres No.12 Tahun 2020. Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Keppres No. 24 Tahun 2021. Tentang Perpanjangan Status Pandemi Covid-19 sebagai Pandemi.

Prayoga, MI. 1976. Pengantar Pariwisata Indonesia, Disjen Pariwisata, Jakarta

Smith, M & Kelly, C. 2006. Holistic Tourism-Journeys of The Self Tourism Recreation

Suj. A. 2008. Analisis Potensi Obyek Alam Pantai.

Sukardi, N. 1998. Pengantar Pariwisata. STP. Nusa Dua Bali

Surat Edaran Gubernur Bali No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Tatanan/Tata Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi Dalam Bali Era Baru.

Undang-Undang No.2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Yoeti, A.O. 1996. Pariwisata Berbasis Budaya, Masalah dan Solusinya, PT. Pradnya Param, Jakarta.

Yoeti. A.O. 1990. Pemasaran Pariwisata. PT. Angkasa. Bandung.



This Journal is licensed under [Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)